

## Usulan Kec. Ciomas dan Klapanunggal Pindah Dapil Menunggu Jawaban KPU RI

**BOGOR (IM)** - Kecamatan Ciomas dan Klapanunggal diuji public. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memindahkan dua kecamatan tersebut dipindah ke daerah pemilihan (Dapil) lainnya.

Hal itu, karena Kecamatan Ciomas tidak termasuk dalam 14 kecamatan yang bakal menjadi daerah otonomi baru (DOB) Bogor Barat, hingga harus dipindahkan dari Dapil IV ke Dapil III.

Sementara, Kecamatan Klapanunggal rencananya akan dipindahkan ke Dapil II dari sebelumnya di Dapil I, karena masuk ke dalam bagian 7 kecamatan yang bakal menjadi DOB Bogor Timur.

"Karena adanya rencana DOB Bogor Barat dan Bogor Timur, maka Kecamatan Ciomas dan Klapanunggal diusulkan ke KPU RI untuk pindah Dapil dari Dapil sebelumnya," ujar Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi

Wahyuni, kemarin.

Ummi Wahyuni menerangkan, dengan berpindahnya dua kecamatan tersebut ke Dapil III dan Dapil II, tidak menjadikan ada penambahan kursi DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil tersebut.

"Rencana pemindahan Dapil ini otomatis akan menambah jumlah kursi DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil tersebut misalnya dari awalnya 9 kursi menjadi 10 kursi," terang Ummi Wahyuni.

Ia menjelaskan, usulan pemindahan Dapil ini segera akan dipresentasikan ke KPU Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dan akan diumumkan hasil keputusannya pada Bulan Februari Tahun 2023 mendatang.

"Usulan pemindahan Dapil, Kecamatan Ciomas dan Klapanunggal ini akan diputuskan oleh KPU RI pada Bulan Februari tahun depan. Sebelumnya, semoga usulan ini lolos uji publik," jelasnya. ● **gio**

## Pemkot Bandung Akselerasi Penanganan Banjir Gedebage

**BANDUNG (IM)** - Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna menginstruksikan Dinas terkait untuk akselerasi penanganan banjir di kawasan Gedebage dan Jalan Rumah Sakit.

"Percepat untuk pengerukan sungai dan peninggian jembatan sinergi dengan BBWS dan PjN (Pelaksana Jalan Nasional)," kata Ema Sumarna, Jumat (16/12).

Ema Sumarna meminta, percepatan peninggian tanggul dan proses lelang menaikan jembatan 60 cm serta peninggian benteng sungai jajawai dan Cinambo baru supaya air tidak meluap.

Selain itu, untuk memperlancar aliran air dilakukan pengerukan dan peninggian jembatan di depan pasar Gedebage serta menghadirkan rumah pompa air yang siap siaga ketika banjir.

Sebelumnya Pemkot Bandung juga telah meresmikan Kolam Retensi Rancabolang yang memiliki sejarah

panjang sejak 2019.

Kolam yang memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi ini mulai berfungsi sebagai penyerap air saat hujan deras.

Bahkan, di tahun ini ada tiga pembangunan rumah pompa di Kota Bandung, yakni di Cinggesed, Rancabolang untuk menanganai banjir di Gedebage dan Adipura.

Selain itu, Ema juga meninjau trotoar di beberapa ruas jalan seperti Jalan Surapati dan Pasteur. Ia meminta trotoar untuk dibenahi dan memperbaiki trotoar yang rusak.

"Supaya lebih rapi dan memperindah estetika kota," ucapnya.

Kali ini Ema meninjau beberapa lokasi di antaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto (TSM), Jalan Rumah Sakit, Pasar Gedebage, Cicaheum, Surapati, Pasteur dan kawasan sekitar RSHS. ● **pra**

## Sidak Bogor Mini Zoo, Bima Arya-BKSDA Kaget Kandang Monyet Sudah Kosong

**BOGOR (IM)** - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat bersama Wali Kota Bogor Bima Arya kembali mendatangi Bogor Mini Zoo usai viral bayi monyet mati dalam kandang. Kandang-kandang monyet di Bogor Mini Zoo mendadak kosong saat rombongan inspeksi mendadak (sidak) datang.

Pantauan di lapangan, Jumat (16/12), Ketua Tim Evakuasi dan Identifikasi BKSDA Jawa Barat, Dani Ramdhani beserta rombongan tiba di area wisata satwa Bogor Mini Zoo sekitar pukul 08.30 WIB.

Tidak lama kemudian, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga datang ke lokasi untuk kedua kalinya. Bima dan Dani didampingi pihak pengelola saat mengecek Bogor Mini Zoo.

"Loh ini monyet yang lainnya mana?" tanya Bima ke pihak pengelola Bogor Mini Zoo ketika melihat kandang monyet yang kosong.

Kepada Bima, pengelola Bogor Mini Zoo mengaku kandang kosong karena monyet yang sebelumnya ada sudah dikembalikan ke penjual di Pasar Pramuka, Jakarta. Jawaban pihak pengelola diragukan Bima, karena ia melihat banyak monyet berukuran kecil di pepohonan di area Bogor Mini Zoo.

Bima meminta tim lintas instansi melakukan investigasi, karena sehari sebelumnya kandang tersebut masih berisi monyet.

"Menurut pengelola (monyet dalam kandang) dikembalikan ke Pasar Pramuka. Tetapi, tadi ada monyet liar di sini. Nah, ini yang saya sebut tim tadi untuk segera memastikan. Termasuk investigasi soal dikembalikan ke Pasar Pramuka. Itu harus jelas, dikembalikannya kapan, siapa yang menerima, kondisinya bagaimana," kata Bima.

"Jangan sampai kondisinya tidak layak diperjual-

belikan lagi, kasihan yang lain. Itu bagian tim tadi lintas instansi (Pol PP, BKSDA, DKPP) untuk investigasi tadi," tambahnya.

Jawaban pihak pengelola Bogor Mini Zoo juga diragukan BKSDA. Sebab, tidak mudah mengembalikan barang yang sudah dibeli dikembalikan ke penjual di pasar gelap. BKSDA menduga ada yang ditutup-tutupi pihak pengelola Bogor Mini Zoo.

"Kita juga bingung ya, karena dari pihak pengelola juga agak tertutup atau menutup-nutupi. Kemungkinan besar ya, indikasinya tidak dijual lagi. Kejadian kemarin kok bisa langsung hilang monyetnya, katanya langsung dijual lagi, dikembalikan lagi, kan nggak mudah ini," kata Dani ditemui di Bogor Mini Zoo.

"Nggak ada (monyet dalam kandang), justru pas saya datang lihat ada monyet di sekitar sini (nunjuk pohon bambu), diindikasikan itu monyet yang sebelumnya di dalam kandang. Soalnya kalau satwa sudah lama di sini akan tetap di sekitar sini ketika dilepas, nggak mungkin begitu dilepas akan jauh," tambahnya.

Dani juga sangat menyangkan jika monyet yang sebelumnya berada dalam kandang, kemudian dilepasliarkan di sekitar Bogor Mini Zoo. Pelepasan monyet justru akan menimbulkan masalah baru selain berpotensi muncul konflik dengan masyarakat, monyet yang dilepaskan seharusnya dipastikan sehat agar tidak menyebarkan penyakit.

"Tapi ketika monyet monyet ini dilepas jadi konflik baru. Karena itu nanti bisa meresahkan masyarakat, karena monyet itu lebih agresif dan lebih agak jahillah, termasuk menyerang, nanti ke rumah kemudian rusak fasilitas rumah, membahayakan artinya," kata Dani. ● **gio**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



**KOLAM RETENSI RANCABOLANG** Warga melihat Kolam Retensi Rancabolang di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/12). Kolam Retensi Rancabolang yang dibangun di lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut dilengkapi dengan pompa sehingga mampu memindahkan 150 liter air per detik guna mengatasi banjir di kawasan tersebut.

## DPR, Pelaku Industri dan Pengemudi Truk Minta Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Diundur

Pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang. Hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023.

**BOGOR (IM)** - Komisi V DPR RI, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2023 diundur.

Mereka menyampaikan alasannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana (Sarpras) untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo menyampaikan, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara ini mengatakan pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023

mendatang. Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023.

"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendasar terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini. Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini," ungkap Sudewo dalam keterangan tertulis, Jum'at (16/12).

Sudewo melanjutkan, Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, belum memperhitungkan kapasitas

jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknnya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus," bebarnya.

"Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya," terangnya.

Sementara itu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin, Binoni Tio A. Napitupulu menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penerapannya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik.

Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita. Sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ODOL ini. Tapi, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul industri kita secara luar biasa," tuturnya.

"Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu. Kami mendukung penerapannya, namun akan perlu dilakukan pemilihan dari sektor, dan sektor itu dilakukan secara bertahap," tambah Binoni.

Mewakili para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan

penundaan Zero ODOL, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rachmat Hidayat, menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan. Menurutnya, penerapan Zero ODOL di tahun 2023 itu sangat berat untuk dilakukan.

"Karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti," jelasnya.

Menanggapi permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Cucu Mulyana berjanji akan melakukan jalan yang terbaik dengan membicarakan lagi terkait dampak Zero ODOL ini dengan semua stakeholder terkait. Jadi, perekonomian harus dijaga, tapi aspek keselamatan juga harus dijaga. Jadi, jangan sampai ada salah satu yang dikorbankan. ● **pra**

## Sedang BAB, Warga Temukan Mayat Pria di Sungai Ciliwung

**BOGOR (IM)** - Pria berinisial HN (32), ditemukan tewas di aliran Sungai Ciliwung, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (16/12). Polisi saat ini masih menyelidiki kemungkinan mayat tersebut.

Kasusie PID Polresta Bogor Kota, Ipda Asep Herdianto mengatakan, jasad HN ditemukan warga sekira pukul 06.15 WIB. Saat itu, warga tersebut tengah buang air besar (BAB) di sekitar lokasi.

"Melihat ada mayat yang tergeletak di bagian sungai yang dangkal (di atas bebatuan)," kata Asep dalam keterangannya, Jumat (16/12).

Saat didekati, terlihat laki-

laki dalam kondisi tergeletak dengan luka robek di bagian kepala. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan ke Ketua RT dan polisi.

"Piket SPKT dan piket Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara dan mendatangkan tim Inafis Polresta Bogor Kota untuk melakukan identifikasi. Mayat dibawa ke RSUD Kota Bogor," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui mayat tersebut berinisial HN (32), warga Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian dan lainnya.

"Penyebab kematian belum diketahui, masih dalam lidik," tuturnya. ● **gio**

## Kota Bandung Butuh 1.500 Kamera CCTV

**BANDUNG (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membutuhkan 1.500 kamera CCTV untuk memantau pergerakan masyarakat. Jumlah kamera CCTV saat ini baru mencapai di angka kurang lebih 200 unit yang tersebar di berbagai persimpangan jalan.

"Sekarang 200 lebih CCTV, idealnya Kota Bandung punya 1.500," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Brilyana, Jumat (16/12).

Dengan kondisi tersebut, ia mengungkapkan pihaknya terus berupaya menambah kamera CCTV tiap tahun. Tahun 2022 ini, pihaknya memasang 55 unit kamera CCTV di berbagai tempat yang rawan tindak kejahatan. "CCTV ini sekarang bertambah di 55, kita tempatkan di tempat rawan. Saya minta masukan kepolisian dan kewilayahan," ujarnya.

Yayan mengatakan sebagian CCTV yang dipasang sudah menggunakan program analisis yang dapat menghitungkan kendaraan masuk ke Jalan Braga. Selain itu dilengkapi speaker yang terkoneksi dengan telepon genggam.

"Kalau penambahan 55

CCTV apakah cukup tentu kurang. Kota-kota besar punya mata mulut telinga di setiap tempat. Kalau CCTV ini kan hanya mata. Nah di luar negeri itu sudah setiap jengkal ada CCTV. Begitu kita melakukan pelanggaran surat masuk ke kita," katanya.

Yayan menuturkan lokasi pemasangan kamera CCTV di Kota Bandung sudah menyebar di berbagai wilayah. Pihaknya mengintegrasikan kamera CCTV milik Diskominfo Bandung dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, dan Dinas Perhubungan.

"Memang ada beberapa yang belum muncul karena CCTV itu teknologi lama. Kita pasang CCTV dari 2014. Nah itu yang harus kita ganti dan menjadi fokus kita di 2023," katanya.

Pihaknya pada tahun 2023 tidak akan menambah CCTV akan tetapi mengganti CCTV yang lama dengan CCTV dengan teknologi baru. Total sepuluh hingga 15 CCTV akan dipasang.

"2023 masih ada penambahan sekitar 10-15 CCTV, yang harus diganti itu ada 80 CCTV di 2023," katanya. ● **pra**



### PERAJIN ANGLO DI KONAWÉ

Seorang perajin merapikan anglo atau tungku arang setelah selesai pembuatan di Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (16/12). Dalam sebulan, perajin mampu memproduksi sekitar 100 buah dengan harga jual Rp45 ribu per buah yang dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Sulawesi Tengah dan wilayah kepulauan di Sulawesi.